

**ABSTRAK**

Sanksi militer dijatuhkan AS pada Indonesia sebagai akibat dari pelanggaran HAM yang dilakukan TNI paska jajak pendapat diTimor Timur tahun 1999. Sanksi AS tersebut tertuang dalam Amandemen Leahy yang menetapkan beberapa poin persyaratan terhadap Indonesia sebelum hubungan militer kembali dilanjutkan.

Sebelum Indonesia memenuhi semua persyaratan dalam Amandemen Leahy tersebut, AS sudah mulai menunjukkan kebijakan meningkatkan kerjasama militer dengan Indonesia pada tahun 2001. Kerjasama militer terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 2001-2005.

Konsep Kepentingan Nasional, Teori Strategis dan Teori Kebijakan Luar Negeri digunakan untuk mengetahui latar belakang AS meningkatkan kerjasama militer dengan Indonesia selama kurun waktu 2001-2005. Dari sini dapat dilakukan suatu kajian mengenai alasan-alasan yang melatarbelakangi kebijakan AS tersebut, setelah terlebih dahulu dilakukan kajian deskriptif mengenai pertimbangan situasi keamanan Indonesia, kapabilitas TNI dan respon Indonesia terhadap masalah terorisme serta upaya perang melawan terorisme global AS paska serangan 11 September.

Dari beberapa kerangka teori yang digunakan dapat diperoleh jawaban sementara, yaitu bahwa alasan-alasan yang melatarbelakangi AS meningkatkan kerjasama militer dengan Indonesia selama kurun waktu 2001-2005 adalah untuk mencapai dan melindungi kepentingan-kepentingan strategis AS dan upaya untuk mengoptimalkan perang melawan terorisme global yang menjadi agenda utama kebijakan luar negeri AS paska serangan 11 September.

Kata kunci: kerjasama militer, kepentingan strategis, terorisme.